

Penyalahgunaan Dana PKH oleh Masyarakat Kurang Mampu di Jorong Limau Puruik Kabupaten Solok

Aisyah Zahra¹, Delmira Syafrini^{2*}, Hanifa Yulia Putri³, Ani Gustina⁴,
Bunga Dinda Permata⁵, Gusmira Wita⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat. Studi ini menjadi penting untuk dikaji karena ditemukan banyaknya masyarakat penerima PKH di daerah tersebut yang menggunakan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati aktivitas masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta wawancara mendalam untuk menggali informasi terkait pola penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan melibatkan 8 informan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama* kurang optimalnya pendampingan dari pembimbing PKH. *Kedua* rendahnya partisipasi penerima dalam kegiatan sosialisasi, *Ketiga* minimnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Kemiskinan; Program Keluarga Harapan; Penyalahgunaan dana.

Abstract

This research aims to analyze the factors causing the misuse of funds from the Family Hope Program (PKH) in Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat. This study is important to examine because it was found that many PKH recipient households in the area used the assistance funds not for their intended purposes, such as for health and education needs. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques were carried out through observation, where researchers were directly involved in observing the activities of PKH recipient households, as well as in-depth interviews to explore information related to the patterns of Family Hope Program (PKH) fund usage. Informants were selected using purposive sampling, involving 8 PKH recipients as research subjects. The results revealed that the misuse of Family Hope Program (PKH) funds was caused by several factors: first, the suboptimal mentoring provided by PKH facilitators; second, the low participation of recipients in socialization activities; and third, the lack of public understanding regarding the proper utilization of Family Hope Program (PKH) funds.

Keywords: Family Hope Program (PKH); Fund misuse; Poverty alleviation; Social assistance.

How to Cite: Zahra, A. et al. (2025). Penyalahgunaan Dana PKH oleh Masyarakat Kurang Mampu di Jorong Limau Puruik Kabupaten Solok. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025*. (pp. 110-118). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia yaitu sebanyak 270,02 juta jiwa pada tahun 2020 (Kominfo, 2021). Jumlah penduduk yang tinggi ini diiringi dengan angka kemiskinan yang tinggi pula. Sebanyak 26,42 juta orang tercatat masih hidup dalam kemiskinan yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi rendah. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan, pemerintah merancang berbagai program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (Dewi et al., 2022). Kemiskinan menurut BPS (2016) menjelaskan bahwa individu yang tidak memiliki kemampuan dalam aspek ekonomi, materi, dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan dapat diukur melalui pengeluaran. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang menunjukkan seseorang tidak mampu merawat dirinya sendiri sesuai dengan standar kehidupan dan tidak dapat mengandalkan mental atau fisik dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak dapat merawat dirinya sendiri (Anggraeni & Nugroho, 2022).

Kemiskinan adalah bentuk masalah utama yang ada kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat di Negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia masih di katakan sebagai negara berkembang karena masih dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang di alami pada tahun 1997 telah memperburuk kondisi sosial ekonomi yang membuat Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan. Kemiskinan juga di artikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara, yang akan berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya (Muin, 2020).

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan salah satu program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), melalui PKH pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak mereka dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam proses pelembagaan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Setelah kita melihat paparan di atas mengenai tujuan dan peran PKH dalam masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan merupakan program yang bersifat memberikan bantuan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan serta mengurangi angka kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Plangiten, 2021).

Untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi diharapkan memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi. Menurut buku pedoman Program Keluarga Harapan (PKH) pembagian kriteria ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut: kriteria komponen kesehatan meliputi: ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Kriteria pendidikan meliputi: anak Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sederajat; anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Sederajat; anak Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) atau Sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Lubis & Zubaidah, 2020).

Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Jorong Limau Puruik memanfaatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Apakah bantuan sosial ini digunakan secara baik atau sebaliknya. Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat penerima PKH secara langsung dengan beberapa pertanyaan dan melakukan observasi kelapangan.

Tabel 1. Data Penerima PKH di Jorong Limau Puruik Tahun 2024

Tahun	Jumlah
2019	150
2020	180
2021	200
2022	220
2023	240

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok 2024

Data di atas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok (2024) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 150 keluarga menerima bantuan PKH. Angka ini terus mengalami kenaikan, dengan 180 penerima pada tahun 2020, kemudian 200 penerima pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dimana pada tahun 2022 jumlah penerima mencapai 220 keluarga, dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 240 keluarga. Bertujuan untuk memberikan dukungan sosial bagi keluarga kurang mampu. Pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas akses bantuan, sekaligus mengindikasikan bahwa masih banyak keluarga yang memenuhi kriteria penerima PKH. Data ini juga dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Hasil penelitian [Muttakin \(2021\)](#) menyatakan rekomendasi manfaat penerima PKH diantaranya pertama, kontribusi teoritis dapat terpenuhi, dibuktikan dengan kemampuan metode ARAS dalam menangani keseluruhan alternatif dan kriteria penilaian secara adil dan transparan. Hal ini diperlukan untuk membantu *decision maker* dalam pemilihan calon penerima manfaat PKH yang sesuai dan layak mendapatkan bantuan. Kedua, kontribusi implementasi ditunjukkan dengan kemampuan algoritma ARAS dapat memberikan rekomendasi alternatif terbaik pada data calon penerima manfaat PKH. Pada dasarnya, PKH secara umum memberikan manfaat langsung bagi penerima terutama membantu biaya pendidikan dan kesehatan, namun belum berpengaruh kepada aspek lainnya. Menurut penelitian [Museliza \(2020\)](#) semakin baik PKH (bantuan-bantuan PKH) yang diberikan kepada KPM PKH maka akan semakin mambai kehidupan para KPM PKH dan akan dapat membuat kehidupan KPM PKH menuju kehidupan yang sejahtera, begitupun sebaliknya, jika PKH (bantuan-bantuan PKH) yang diterima oleh KPM PKH tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya ataupun tidak adanya peningkatan bantuan PKH maka kesejahteraan KPM PKH tidak akan tercapai.

Penelitian tentang pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan sudah dilakukan oleh beberapa penelitian diantaranya penelitian pertama yang dilakukan oleh [Muliadi \(2022\)](#), menjelaskan bahwa melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Kedua penelitian yang dilakukan oleh [Ghofur \(2019\)](#), menunjukkan bahwa melalui penerimaan dana PKH diharapkan mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan, tetapi selama ini tidak ada yang mengharuskan penerima PKH agar menggunakan uang bantuan PKH untuk akses pendidikan maupun kesehatan. Ketiga Penelitian menjelaskan bahwa banyak diantara penerima dana bantuan PKH ini yang menggunakan dananya untuk keperluan lain seperti misalnya membayar kredit atau membayar hutang, digunakan untuk jalan-jalan dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan anjuran. Keempat penelitian yang dilakukan oleh [Saragi et al. \(2021\)](#), menjelaskan bahwa adanya bantuan PKH telah berdampak baik kepada masyarakat Desa Kota Rantang. Ibu hamil dapat menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak balita dapat meningkat, begitupun dengan anak-anak yang dapat bersekolah hingga lulus dan mendapatkan pekerjaan. Kelima penelitian yang dilakukan oleh [Paulina et al. \(2024\)](#), menjelaskan bahwa petugas pendamping PKH jarang memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pendamping PKH belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang menerima manfaat bantuan tersebut.

Pada penelitian di atas telah mengungkapkan permasalahan dalam pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak tepat sasaran penerima dana sosial PKH dan penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan sesuai dengan tujuan program yang dibuat oleh pemerintahan. Namun berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dimana hanya berfokus pada faktor penyebab penyalahgunaan dana PKH pada masyarakat penerima PKH di Jorong Limau Puruik Kabupaten Solok. Perbedaan utama antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokusnya. Sementara sebagian besar penelitian mengkaji efektivitas, implementasi, atau dampak PKH, penelitian ini berfokus secara khusus pada penyalahgunaan dana PKH. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi untuk memahami lebih dalam masalah penyalahgunaan dana bantuan sosial tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur terkait PKH dengan perspektif yang lebih kritis.

Metode Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat dalam rentang waktu Februari 2025 hingga Mei 2025. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif akan mendiskripsikan bagaimana penyalahgunaan dana PKH oleh

masyarakat Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kabupaten Solok. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang dimana peneliti akan mewawancarai masyarakat penerima dana PKH. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* artinya memilih sumber data yang akan diwawancarai dengan beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010). Jenis dan sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder yang peneliti didapatkan secara langsung dan dikumpulkan dari lapangan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan informan mengenai penyalahgunaan dana PKH masyarakat Jorong Limau Puruik. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penerima dana PKH Jorong Limau Puruik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan aktif dan wawancara terstruktur. Triangulasi data pada penelitian ini dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk melihat keabsahan data. Sedangkan proses analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Dana Program Keluarga Harapan (PKH) berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan melalui bantuan tunai yang disalurkan kepada mereka. Dana ini diharapkan digunakan untuk kebutuhan pokok, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, serta untuk mendorong akses layanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa faktor yang penyalahgunaan dana PKH yang akan menjadi hasil penelitian dan di jabarkan sebagai berikut:

Kurangnya Bimbingan Dari Pembimbing PKH

Bimbingan dari pembimbing PKH (Program Keluarga Harapan) adalah untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pembimbing PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, dan edukator bagi KPM, membantu mereka dalam memahami program PKH, memanfaatkan bantuan, dan meningkatkan kualitas hidup. Kurangnya bimbingan dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menyebabkan beberapa akibat negatif. Penerima manfaat PKH mungkin tidak memahami dengan baik tujuan program dan kewajibannya, yang dapat menghambat pencapaian tujuan PKH. Selain itu, kurangnya bimbingan dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada bantuan PKH dan kurangnya upaya mandiri untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam penggunaan dana PKH masyarakat Jorong Limau Puruik tidak mendapatkan informasi dari pembimbing PKH seperti yang di nyatakan oleh ibu S (55):

“...Sebenarnya, kami tidak dapat penjelasan detail soal penggunaan dana PKH dari pembimbing. Pasalnya, setiap pertemuan, pembimbing lebih fokus mengecek kehadiran anggota lalu langsung membahas proses pencairan dana. Hampir semua waktu dipakai untuk urusan teknis pencairan dan evaluasi kegiatan kelompok, seperti mengecek apakah kami sudah mengikuti pertemuan atau belum. Alhasil, kami masih bingung sebenarnya dana PKH itu boleh dipakai untuk apa saja, apakah untuk biaya sekolah anak, beli kebutuhan pokok, atau hal lainnya. Informasinya tidak pernah disampaikan secara jelas...” (Wawancara 23 April 2025).

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa proses pendampingan program Keluarga Harapan (PKH) tidak optimal dalam memberikan pemahaman tentang tujuan penggunaan dana kepada penerima manfaat. Pembimbing lebih berfokus pada aspek administratif, seperti verifikasi kehadiran dan prosedur pencairan, tanpa menyisihkan waktu untuk sosialisasi mendalam mengenai pemanfaatan dana sesuai ketentuan program. Akibatnya, banyak peserta yang kebingungan tentang alokasi dana PKH yang seharusnya, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih edukatif dalam pendamping, agar dana tidak hanya berhasil dicairkan tetapi juga digunakan secara tepat sasaran untuk memutuskan rantai kemiskinan. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu N (45):

“...Menurut saya bimbingan dari pembimbing PKH itu masih kurang, kemudian untuk pertemuan antara pembimbing dengan anggota penerimanya, saya rasa juga kurang. Dimana pada saat pertemuan kurangnya komunikasi antara pembimbing dengan anggota juga akan menimbulkan kesalahanpahaman dalam menerima informasi yang didapatkan. Saya berharap pembimbing dapat lebih sering untuk mengadakan pertemuan dan memberikan bimbingan yang lebih baik dan dapat dipahami...” (Wawancara 24 April 2025).

Kutipan di atas menggambarkan bahwa bimbingan dari pembimbing PKH masih kurang. Pertemuan antara pembimbing dengan anggota penerima PKH juga masih kurang. Ketika pertemuan antara pendamping PKH dengan anggota penerima PKH juga sering terjadi kesalahpahaman ketika menerima informasi yang didapatkan oleh anggota penerima dana PKH. Dengan ini mereka berharap semoga pendamping PKH dapat sering mengadakan pertemuan dan memberikan informasi ketika pertemuan dengan baik juga mudah dipahami oleh penerima dana PKH. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dana PKH karena penerima tidak dapat memahami apa yang disampaikan pembimbing ketika pertemuan dan juga pertemuan juga tidak dilakukan secara sering.

Penerima PKH Tidak Menghadiri Sosialisasi PKH

Kondisi di mana penerima PKH tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang program tersebut, termasuk tujuan, persyaratan, dan manfaatnya dari kegiatan sosialisasi PKH. Kurangnya komunikasi ini bisa disebabkan oleh penerima PKH yang sulit di hubungi untuk melakukan pertemuan penerima PKH dengan Pembimbing PKH. Seperti hal yang di nyatakan oleh ibu A (48):

“...Menghubungi penerima PKH itu sangat sulit. Kadang kami harus menunggu sampai seminggu lebih karena nomor telepon mereka tidak aktif atau tidak bisa dihubungi. Masalahnya, sebagian penerima PKH adalah lansia yang bahkan tidak punya handphone, jadi mustahil untuk mengingatkan mereka lewat telepon. Akhirnya, saya terpaksa mendatangi rumah mereka satu persatu untuk mengundang mereka ikut pertemuan. Kalau tidak seperti itu, mereka tidak bisa datang sama sekali karena tidak tahu jadwal atau tidak dapat informasi...” (Wawancara 23 April 2025).

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa komunikasi dengan penerima PKH sering terkendala karena keterbatasan akses teknologi, terutama pada penerima yang sudah lansia atau tidak memiliki handphone. Hal ini menyebabkan proses koordinasi menjadi lambat dan tidak efektif, karena pihak pendamping harus menunggu sehari-hari bahkan sampai harus melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah penerima untuk memastikan kehadiran mereka dalam pertemuan. Tantangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih personal dan adaptif, seperti sistem pendampingan berbasis kunjungan rumah atau penggunaan metode komunikasi alternatif (misalnya melalui tetangga atau keluarga terdekat), agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan partisipasi penerima PKH tetap terjaga. Seperti yang juga diungkapkan oleh ibu E (47):

“...Saya tidak tahu jadwal sosialisasi PKH, karena pertemuannya itu tidak dijadwalkan atau bahkan terkadang secara mendadak diadakan pertemuannya selain itu saya juga tidak mempunyai handphone untuk mendapatkan informasi secara langsung atau cepat. Meskipun juga ada yang mendatangi kerumah saya tetapi tidak bertemu dengan saya secara langsung itu terkadang juga membuat saya lupa mengenai pertemuan yang akan diadakan tersebut. Sehingga saya kesulitan untuk ikut pertemuan PKH...” (Wawancara 23 April 2025).

Dari kutipan di atas bahwasanya jadwal sosialisasi untuk penerima dana PKH itu pertemuannya tidak dijadwalkan bahkan sering secara mendadak untuk diadakannya pertemuan. Selain itu mereka penerima PKH ada juga yang tidak memiliki handphone jadi mereka sulit untuk mendapatkan informasi secara langsung atau cepat. Meskipun ada yang datang kerumah mereka untuk memberikan informasi tetapi kadang tidak bertemu secara langsung dengan penerima PKH karena itu membuat mereka lupa mengenai pertemuan yang akan diadakan oleh pembimbing. Jadi mereka sulit untuk mengikuti pertemuan atau sosialisasi mengenai dana PKH.

Kurangnya pemahaman mengenai pemanfaatan dana program PKH

Masyarakat Jorong Limau Puruik rata-rata mata pencaharian mereka itu adalah bertani dan berkebun. Pertanian dan perkebunan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi tanaman atau hasil panen di suatu kebun, mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Biaya ini mencakup berbagai komponen seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa lahan, dan lain-lain. Bahkan karena uang untuk melakukan kegiatan mereka itu mereka menggunakan uang dari dana PKH padahal, dana PKH diutamakan untuk pendidikan dan kesehatan, tetapi karena kurangnya pemahaman tentang tujuan program PKH ini. Seperti yang di nyatakan ibu M (39):

“...Sebenarnya, kami sering menggunakan uang PKH untuk beli perlengkapan kebun karena kebutuhan mendesak, seperti bibit, pupuk, atau pertanian. Kalau kebun tidak diurus, kami bisa kehilangan hasil panen, dan itu masalah besar bagi kami. Selain itu, dana PKH juga sering dipakai untuk kebutuhan lain yang dirasa penting, seperti biaya rumah tangga atau kebutuhan

sehari-hari. Tapi sebenarnya, kami tidak tahu persis seharusnya uang PKH itu dipakai untuk apa, apakah boleh untuk kebun atau tidak. Soalnya, pembimbing sama sekali tidak pernah menjelaskan aturannya. Kami hanya menerima uang dan menggunakan sesuai kebutuhan yang paling mendesak saat itu... ” (Wawancara 25 April 2025)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa banyak penerima PKH menggunakan dana tersebut untuk keperluan di luar tujuan resmi program, seperti membeli perlengkapan perkebunan atau menutupi kebutuhan rumah tangga mendesak. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak pendamping mengenai alokasi dana PKH yang seharusnya, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau peningkatan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Akibatnya, penerima manfaat cenderung mengalokasikan dana berdasarkan prioritas kebutuhan sehari-hari tanpa pemahaman yang jelas tentang aturan penggunaannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan yang lebih intensif dan edukatif agar dana PKH dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan program, yaitu memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Sama hal yang juga diungkapkan oleh ibu N (45):

“...Dana PKH saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan perkebunan saya. Tapi saya lebih sering menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya tidak mengetahui kegunaan dana PKH yang seharusnya, karena saya juga sering hadir pada pertemuan sosialisasi PKH itu tapi saya tidak memahami kegunaan yang seharusnya...” (Wawancara 24 April 2025).

Berdasarkan kutipan di atas bahwasanya dana PKH mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan perkebunan. Hal ini tidak sesuai dengan penggunaan dana PKH yang seharusnya. Tetapi lebih sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena tidak mengetahui kegunaan dana PKH yang seharusnya. Walaupun sering mengikuti pertemuan dan sosialisasi tetapi tidak memahami kegunaan mengenai dana PKH.

Pembahasan

Kemiskinan secara konseptual merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial. Dimana masalah kesejahteraan sosial ada yang secara nyata berpangkal pada hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, ada yang timbul dan berkembang sebagai pengaruh dari perubahan sosial-ekonomi serta penggunaan ilmu dan teknologi dalam kehidupan manusia. Berdasarkan temuan penelitian di Jorong Limau Puruik, kurangnya bimbingan dari pendamping PKH dan ketidaktahuan penerima manfaat tentang alokasi dana yang tepat mencerminkan kegagalan pendekatan topdown dalam program pengentasan kemiskinan. Menurut World Bank tahun 2015, kemiskinan tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga *deprivation of capability*, ketidakmampuan individu mengakses informasi dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini terlihat ketika penerima PKH menggunakan dana untuk perkebunan atau kebutuhan harian akibat tidak adanya sosialisasi, sehingga program gagal memenuhi tujuannya sebagai investasi human capital melalui pendidikan dan kesehatan.

Keterbatasan komunikasi dengan penerima lansia dan petani juga memperlihatkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang memperparah eksklusi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh [Towsend \(2010\)](#) dalam konsep *relational poverty*. Pendampingan yang hanya fokus pada aspek administratif (seperti pencarian dana) tanpa edukasi, sesuai kritik [Alkire, S., & Foster \(2011\)](#), justru memperkuat *cyclical poverty* karena dana tidak digunakan untuk memutus rantai kemiskinan jangka panjang. Padahal, program PKH dirancang untuk memengaruhi *intergenerational poverty* dengan syarat anak sekolah dan pemeriksaan kesehatan ([Rawlings & Rubio, 2005](#)). Kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*) adalah kondisi di mana kemiskinan berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga. Ini sering disebut juga sebagai "siklus kemiskinan" atau "perangkap kemiskinan" ([Parolin et al., 2024](#)).

Lebih jauh, ketergantungan petani pada dana PKH untuk biaya produksi perkebunan menunjukkan kegagalan program dalam memahami akar kemiskinan struktural di pedesaan. Menurut [Moser \(2008\)](#), kemiskinan petani sering bersifat *assetless poverty*, di mana ketiadaan akses ke kredit pertanian formal memaksa mereka mengalihkan dana bantuan sosial ke sektor produktif. Solusinya, pendampingan PKH perlu mengintegrasikan program dengan pelatihan pertanian berkelanjutan dan akses permodalan, sebagaimana rekomendasi [Banerjee & Duflo \(2013\)](#), dalam pendekatan *experimental approach to poverty alleviation*. Menurut [Noorikhshan & Gunawan \(2022\)](#), tipe kemiskinan yang paling lazim adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini bukanlah masalah individu, melainkan kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat akibat beragam penyebab dari kondisi masyarakat yang rumit dan berlipis. Situasi ini terjadi dalam waktu yang lama.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas PKH tidak hanya bergantung pada transfer dana, tetapi pada pendampingan partisipatif yang membangun *agency* penerima

manfaat. Tanpa perubahan paradigma dari *charity-based* ke *empowerment-based*, program ini berisiko menjadi sekadar bantuan temporer yang tidak mengubah struktur kemiskinan di tingkat akar rumput. Menurut Parni & Nurman (2020) ada tiga faktor mempengaruhi pemanfaatan dana PKH yaitu: kurangnya pengawasan dari pendamping PKH, penerima PKH tidak menghadiri kegiatan sosialisasi PKH, dan adanya penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan faktor di atas menunjukkan bahwasanya dana PKH memiliki faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dana PKH. Dari hasil penelitian bahwasanya faktor pengaruh pemanfaatan dana PKH terbukti juga terjadi pada penelitian yang di buat oleh peneliti ini. Penerima PKH di Jorong Limau Puruik mendapatkan kurangnya pengawasan dari pembimbing PKH, dan penerima PKH tidak mengikuti sosialisasi PKH.

Menurut Usman (2019) ada faktor KKN, penyalahgunaan dana oleh masyarakat, dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Hal ini juga sama dengan faktor penyalahgunaan PKH bahwasanya faktor pengawasan pemerintah juga mempengaruhi dalam penggunaan dana PKH. Adanya pengawasan pemerintah maka penggunaan dana PKH dapat berjalan dengan baik, akan mengurangi penyalahgunaan dana PKH di Indonesia. Tujuan program PKH masih belum efektif dalam penggunaannya, karena bantuan yang diterima masyarakat digunakan untuk kepentingan lain. Pemantauan Program, Petugas pendamping PKH jarang memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pendamping PKH belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang menerima manfaat bantuan tersebut (Paulina et al., 2024). Hal ini yang menyebabkan penggunaan dana PKH yang tidak efektif tidak sesuai dengan tujuan program PKH yang telah di buat oleh pemerintahan.

Kualitas pelayanan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo telah berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang ada, namun masih terdapat kelemahan tetapi kelemahan tersebut perlu pembenahan lebih lanjut. Faktor Penghambat dan pendukung baik kedisiplinan masyarakat serta faktor kesadaran masyarakat masih kurang tetapi bukan merupakan penghambat aparat dalam memberikan pelayanan (Daniati, 2022). Kualitas pelayanan bantuan PKH sangat di perlukan untuk setia daerah di Indonesia terutama pada daerah yang terbanyak mendapatkan program PKH.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana PKH terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya bimbingan dari pembimbing PKH, ketidakhadiran penerima PKH dalam sosialisasi, dan Kurangnya pemahaman tentang tujuan program. Kurangnya pengawasan dan edukasi dari pendamping PKH menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan utama program, yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kesulitan komunikasi dengan penerima PKH memperparah masalah ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya pengawasan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana PKH secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan untuk memastikan dana PKH digunakan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui akses pendidikan dan kesehatan lebih baik. Riset ini penting untuk dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya karena penyalahgunaan PKH dipengaruhi dari beberapa faktor yang lebih kompleks yang dapat diteliti oleh penelitian selanjutnya seperti faktor lingkungan, termasuk analisis beban kerja pendamping dan kualitas interaksi dengan penerima.

Rujukan

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Penghitungan dan pengukuran kemiskinan multidimensi. *Jurnal Ekonomi Publik*, 95(7–8), 476–487.
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4(2), 39–54. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/529>
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2013). Ekonomi Miskin. Pemikiran Ulang yang Radikal tentang Cara Memerangi Kemiskinan Global. *Masyarakat Dan Ekonomi*, 35 (4), 573–587.
- Daniati, E. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(2), 1060–1066.
- Dewi, R. A., Nurjannah, S., & Komalasari, M. A. (2022). *Program Harapan*. 4(1), 119–139.

-
- Ghofur, A. (2019). Analisis Dampak Pemanfaatan Dana PKH (Program Keluarga Harapan) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Praja Lamongan*, 2(2), 47–55.
- Helaluddin, H. W., & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88–99. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.2801>
- Moser, C. (2008). *Mengurangi kemiskinan global: Kasus akumulasi aset*. Rowman & Littlefield.
- Muin, R., & Rosdiana, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(2), 130-147.
- Muliadi, M. (2022). Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur (Suatu Analisis Pemecahan Masalah Penyaluran PKH). Universitas Islam Jakarta.
- Museliza, V., Afrizal, A., & Eliza, R. (2020). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 118–127. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.116>
- Muttakin, F., Fatwa, K. N., & Sarbaini, S. (2021). Implementasi Additive Ratio Assessment Model untuk Rekomendasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Sitekin: Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 19(1), 40–48. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin/article/view/14786>
- Noorikhshan, F. F., & Gunawan, H. (2022). Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.10324>
- Parni, M., & Nurman, N. (2020). Pemanfaatan Dana PKH oleh Masyarakat Kurang Mampu di Kanagarian Alahan Panjang. *Journal of Civic Education*, 1(4), 309–316. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i4.305>
- Parolin, Z., Pintro-Schmitt, R., Esping-Andersen, G., & Fallesen, P. (2024). Intergenerational persistence of poverty in five high-income countries. *Nature Human Behaviour*, 9(February). <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02029-w>
- Mahdalina, M., & Paulina, S. (2024). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sei Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5723-5729.
- Senduk, N. V., Kiyai, B., & Plangiten, N. (2021). Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).
- Rawlings, L. B., & Rubio, G. M. (2005). Evaluating the impact of conditional cash transfer programs. *World Bank Research Observer*, 20(1), 29–55. <https://doi.org/10.1093/wbro/lki001>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, C. (2019). Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan (suatu studi di kecamatan kota utara kota gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(001), 1200. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/4503>
-